



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.11.2.667780/2024**



DS:2191-4652-4407-1451

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Provinsi : (33) PAPUA BARAT
4. Kode>Nama Satker : (667780) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
- Sebesar : Rp. 237.415.000 (DUA RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 237.415.000
013.11.WA.	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 237.415.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 237.415.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 237.415.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667780/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2191-4652-4407-1451

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667780) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	013.11.WA	Program Dukungan Manajemen			237.415.000
Kegiatan	:	5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			237.415.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	237.415.000
Rincian Output	:	01	ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	4,00	Rekomendasi Kebijakan	205.153.000
		02	ABD.002 Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	32.262.000

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667780/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2191-4652-4407-1451

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667780) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
667780	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	-	237.415	-	-	-	237.415		
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	-	237.415	-	-	-	237.415		
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	-	237.415	-	-	-	237.415		
5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	237.415	-	-	-	237.415	33.00	
01	RM	-	237.415	-	-	-	237.415	065	
JUMLAH		-	237.415	-	-	-	237.415		

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667780/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2191-4652-4407-1451

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667780) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667780	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	4.561	16.987	34.122	8.757	22.031	52.662	14.641	10.120	27.005	22.313	13.040	11.175	237.415
		BELANJA BARANG	4.561	16.987	34.122	8.757	22.031	52.662	14.641	10.120	27.005	22.313	13.040	11.175	237.415
	013.11.WA.5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	4.561	16.987	34.122	8.757	22.031	52.662	14.641	10.120	27.005	22.313	13.040	11.175	237.415
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	4.561	16.987	34.122	8.757	22.031	52.662	14.641	10.120	27.005	22.313	13.040	11.175	237.415

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667780/2024
IV A. B L O K I R**



DS:2191-4652-4407-1451

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [667780] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667780/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:2191-4652-4407-1451

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [667780] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002